



PENAFSIRAN PERAN POLITIK PEREMPUAN: Kritik Fatima Mernissi Perspektif Feminis

Ghufron Maksum ^{*1}, Nur Afiyah ^{*2}, Naila Magfira Alwasi ^{*3}

STAI Nurul Iman Parung Bogor, Universitas Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an Jakarta

E-mail: * ghufronmaksum@yahoo.com , veanurafiyah@gmail.com
nailamalwasi@gmail.com

Diterima: 23/03/2025; Diperbaiki: 10/04/2025; Disetujui: 19/05/2025

Abstracts

This research explores Fatima Mernissi's criticism of women's political roles in the Qur'an through a feminist approach. The focus of the research lies on analyzing the discourse of Qur'anic interpretation which, according to Mernissi, often reproduces patriarchal narratives that limit women's participation in the political sphere. The purpose of the study is to evaluate how the Muslim feminist perspective, Mernissi reveals the bias of traditional interpretations and offers a more egalitarian reinterpretation of the Qur'anic text. This research uses a library research method with a critical text analysis approach to Mernissi's works and classical and contemporary Qur'anic interpretations. The data is analyzed with a feminist approach to identify patterns of gender bias in the interpretation of certain verses related to politics and women's leadership. The results showed that Mernissi's criticism succeeded in deconstructing traditional interpretations that tend to rule out the potential of women in politics, while emphasizing that the Qur'an actually opens space for equal gender roles. The conclusion of this study emphasizes the importance of a feminist approach to reconstructing the understanding of sacred texts, so that they are more relevant in supporting gender inclusivity and justice in the modern political context.

Keywords: Fatima Mernissi, Women's Political Role, Tafsir Al-Qur'an, Feminist

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi kritik Fatima Mernissi terhadap peran politik perempuan dalam penafsiran melalui pendekatan feminis. Fokus penelitian terletak pada analisis wacana tafsir al-Qur'an yang menurut Mernissi, kerap mereproduksi narasi patriarki yang membatasi partisipasi perempuan dalam ruang politik. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi bagaimana perspektif feminis muslim, Mernissi mengungkap bias tafsir tradisional dan menawarkan reinterpretasi yang lebih egaliter terhadap teks al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis teks kritis terhadap karya-karya Mernissi dan tafsir-tafsir al-Qur'an klasik maupun kontemporer. Data dianalisis dengan pendekatan feminis untuk mengidentifikasi pola-pola bias gender dalam interpretasi ayat-ayat tertentu yang terkait dengan politik dan kepemimpinan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik Mernissi berhasil mendekonstruksi tafsir-tafsir tradisional yang cenderung mengesampingkan potensi perempuan dalam politik, sembari menegaskan bahwa al-Qur'an sesungguhnya membuka ruang bagi kesetaraan peran gender. Kesimpulan dari penelitian

ini menekankan pentingnya pendekatan feminis untuk merekonstruksi pemahaman teks suci, sehingga lebih relevan dalam mendukung inklusivitas dan keadilan gender dalam konteks politik modern.

Kata kunci: *Fatima Mernissi, Peran Politik Perempuan, Tafsir Al-Qur'an, Feminis.*

Pendahuluan

Berbicara tentang kesetaraan gender mungkin tidak akan ada habisnya apalagi jika budaya patriarki masih saja terus melenggang hingga saat ini. Kesetaraan gender ini selalu menjadi isu menarik untuk dikaji, dan seharusnya yang bertanggung jawab atas kesetaraan gender ini ialah kita bersama baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender bukanlah ambisi yang menjadikan perempuan harus berada diatas laki-laki dan begitupun sebaliknya, tetapi yang diharapkan dari kajian tentang kesetaraan gender ini ialah semua makhluk ciptaan Tuhan itu setara, tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang merasa didominasi. Ini adalah sebuah cara memanusiakan manusia, karena sejatinya semua manusia dihadapan Allah adalah setara yang membedakan hanyalah ketakwaanannya sebagaimana pun dalam al-Qur'an dijelaskan seperti itu. Salah satu isu sentralnya ialah persoalan kepemimpinan perempuan yaitu peran perempuan dalam ruang publik dan politik.

Peran perempuan dalam politik merupakan isu yang telah lama dibahas dalam kajian sosial, politik, dan agama. Dalam konteks Islam, banyak interpretasi terhadap teks-teks suci, khususnya al-Qur'an, yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. Tradisi tafsir klasik cenderung membatasi ruang peran perempuan dalam bidang publik, termasuk politik, dengan menekankan aspek-aspek domestik dan privat mereka. Namun, seiring dengan berkembangnya pemikiran feminis, banyak pemikir Muslim, seperti Fatima Mernissi, yang berusaha mendekonstruksi interpretasi ini.¹ Mernissi mengkritik tafsir tradisional yang menurutnya telah mempersempit peran perempuan, termasuk dalam politik, melalui interpretasi patriarkal yang mengabaikan potensi perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan.² Pemikiran Mernissi memberikan perspektif baru dalam membahas peran perempuan dalam politik melalui kacamata feminis, membuka diskursus baru dalam tafsir al-Qur'an yang lebih inklusif dan egaliter.³

Fatima Mernissi, dalam karya-karyanya, secara kritis menilai bagaimana interpretasi teks al-Qur'an sering kali dipengaruhi oleh norma-norma patriarki yang mengarah pada pengurangan peran politik perempuan. Dalam salah satu bukunya *The Forgotten Queens of Islam* dan *Beyond the Veil*, Mernissi menyatakan bahwa sejarah politik Islam telah diwarnai oleh pengabaian terhadap kontribusi perempuan, baik dalam ranah kepemimpinan maupun dalam pengambilan keputusan politik.⁴

Beberapa penelitian terkini juga menunjukkan bagaimana tafsir konvensional sering kali mengesampingkan posisi strategis perempuan dalam kehidupan publik dan politik, seiring dengan dominasi pemikiran patriarkal dalam pembacaan teks agama.

¹ Suud Sarim Karimullah dan Siti Rutbatul Aliyah, "Feminist Criticism of Traditional Understanding of Women's Roles in Islam", *An-Nisa: Journal of Gender Studies*, Vol. 16, No. 2, (2023): 196.

² Mohd Anuar Ramli, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, dkk, "Muslim-Malay Women in Political Leadership: Navigating Challenges and Shaping the Future", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1 (2024): 320.

³ Muarrah N dan Sunil MB, "Exploring Gender Equality: A Comparative Study of Contemporary Feminism, Islamic Perspectives, and Feminism in Sufism", *Philosophy International Journal*, Vol. 7, No. 2, (2024): 2.

⁴ Hacer Ayaz, "Methodological Approaches Used in the Works of Fatima Mernissi on Issues of Islam and Gender Equality", *Internasional Journal of Social Sciences*, Vol. 7, No. 28 (2023): 238.

Oleh karena itu, pemikiran Mernissi yang mencoba membuka ruang bagi partisipasi politik perempuan dalam Islam memberikan sumbangan penting terhadap pengembangan tafsir feminis.⁵

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kritik Fatima Mernissi terhadap peran perempuan dalam politik, serta untuk mengkaji bagaimana perspektif feminis Mernissi memberikan alternatif pembacaan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan politik dan kepemimpinan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana tafsir feminis Mernissi dapat menginspirasi interpretasi yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan dalam konteks politik Islam kontemporer. Melalui pendekatan kepustakaan, penelitian ini akan mengkaji teks-teks karya Mernissi dan analisis- analisis tafsir terkait untuk memberikan wawasan baru dalam pemahaman politik perempuan dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis teks kritis terhadap karya-karya Fatima Mernissi dan tafsir-tafsir al-Qur'an klasik serta kontemporer. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi bagaimana Mernissi mengkritik tafsir tradisional yang membatasi peran perempuan dalam politik, serta menggali pola-pola bias gender dalam interpretasi ayat-ayat terkait kepemimpinan perempuan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan feminis untuk mengeksplorasi perbedaan perspektif dalam tafsir, baik yang mendukung maupun yang membatasi peran perempuan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai peran perempuan dalam politik Islam dan menyoroti kontribusi pemikiran Fatima Mernissi dalam mendekonstruksi tafsir patriarkal menuju pembacaan yang lebih inklusif dan egaliter.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Fatima Mernissi dan Latar Belakang Intelektual

Fatima Mernissi dilahirkan pada tahun 1940 di Fez, Maroko, Afrika Utara, sekitar seribu meter di sebelah timur Madrid.⁶ Fatima Mernissi tinggal dan dibesarkan dalam sebuah Harem⁷ bersama ibunya dan neneknya. Ia berasal dari sebuah keluarga kelas menengah atas. Kota kelahirannya merupakan salah satu pusat gerakan nasionalis. Tingginya dinding Harem ternyata tidak menjadi penghambat Fatima untuk bersifat kritis terhadap keadaan. Salah seorang neneknya yang bernama Yasmina, selalu mengajarkannya kepadanya mengenai kesetaraan. Yasmina, meskipun

⁵ Hacer Ayaz, "Methodological Approaches Used in the Works of Fatima Mernissi on Issues of Islam and Gender Equality", 242.

⁶ Roibin, Ahmad Qiram As-Suvi, dkk, "The Domestication of Women's Roles as a Reflection of Ancient Patriarchal Traditions: A Reflection on The Thoughts of Friedrich Engels and Fatimah Mernissi", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 22, No. 1, (2023): 65.

⁷ Harem dalam budaya Timur Tengah, sering kali dianggap sebagai tempat yang terpisah dan tidak dapat diakses oleh laki-laki di luar keluarga dekat, dengan tujuan menjaga kehormatan dan privasi perempuan. Dalam konteks Fatima Mernissi, "Harem" mengacu pada ruang domestik tempat ia dibesarkan, yang didominasi oleh perempuan, seperti ibunya dan neneknya. Meski terletak dalam lingkungan yang terbatas secara fisik, Mernissi mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang kesetaraan, yang akhirnya membentuk pandangannya mengenai peran perempuan dalam masyarakat.

seorang perempuan desa yang tidak terpelajar, akan tetapi memiliki kecerdikan lebih banyak dari pada istri-istri Sidi Tazi, suami Yasmina, kakek Fatima.

Pendidikan pertama diperoleh Fatima di sekolah pengajian al-Qur'an. Di sekolah ini dia diajarkan oleh salah seorang neneknya sendiri, Lala Faqiha, yang merupakan guru di sekolah ini. Neneknya selalu mengajarkan secara keras bila ia berada di sekolah, sangat bertolak belakang apabila ia berada di rumah. Ketika menginjak gadis remaja Fatima mendapatkan pelajaran agama di lembaga pendidikan bidang *as-sunnah*. Di lembaga pendidikan ini ia menemukan suatu kejadian yang membuatnya terluka oleh Hadits-Hadits yang menurutnya menyudutkan perempuan, bahkan sampai pada pembelengguan perempuan terhadap kebebasan hidup, dan ia tidak pernah percaya bahwa Nabi pernah mengatakan hal yang terdapat pada Hadits tersebut.

Fatima pertama kali menamatkan studinya di Universitas Muhammad V, di Rabat. Dengan menamatkan studinya ia telah membuktikan bahwa ia telah berhasil melewati dinding harem yang tinggi, dengan cara melewati jenjang pendidikan. Setelah studinya, ia sempat bekerja sebagai wartawati di Paris. Di samping bekerja, ia juga melanjutkan kuliahnya di Universitas Sorbone Paris dalam bidang sosiologi dan politik. Pada tahun 1973 Fatima meraih gelar Ph.D dari Brandeis University, Amerika Serikat dalam bidang yang sama. Setelah mendapatkan gelar Ph.D, ia kembali ke tanah airnya, Maroko. Fatima mengajar di jurusan sosiologi pada almamaternya (Universitas Muhammad V).

Selain itu juga, Fatima terus aktif menulis dan menjalankan berbagai riset yang berkaitan dengan bidangnya di Marocco's Institute Universitaire de Recherche Scientifique. Sebagai seorang feminis Islam, Fatima aktif di berbagai organisasi perempuan Afrika Utara, untuk menyuarakan persoalan-persoalan perempuan Islam, yang pada akhirnya ia termasuk figur yang cukup diperhitungkan oleh kalangan aktivis perempuan dunia, khususnya dunia Islam.⁸

Mernissi tumbuh dalam lingkungan keluarga kelas menengah, mengalami masa kecil yang bahagia, tinggal bersama sepuluh sepupu seumuran, laki-laki dan perempuan di sebuah rumah besar. Pendidikan yang dijalani dimulai dari sekolah al-Qur'an, yang merupakan pendidikan tradisional dengan karakteristik serupa sekolah pada zaman pertengahan, serta biaya pendidikan yang terjangkau. Hal ini memenuhi harapan banyak orang tua yang ingin memulai pendidikan anak-anak mereka.

Sebuah pengalaman yang masih kurang menguntungkan untuk Mernissi saat bersekolah di sekolah al-Qur'an adalah ketidakmampuannya untuk melagukan ayat-ayat al-Qur'an dengan suara yang merdu. Karena hal tersebut, dia tidak pernah diberi kesempatan untuk tampil di barisan depan dalam setiap peringatan hari-hari bersejarah dalam Islam, meskipun sebenarnya Mernissi memiliki daya ingat dan kecerdasan yang baik. Mernissi melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti sekolah menengah pertama di Sekolah Nasional dan sekolah menengah atas di Institut Khusus Wanita, yang didanai oleh pemerintah Perancis.

Pada masa mudanya, dia terlibat secara aktif dalam perlawanan terhadap penjajahan Perancis demi mencapai kemerdekaan nasional. Bersama dengan pemuda

⁸ Anita Handayani, "Fatima Mernissi: Riwayat Hidup dan Perjuangannya Dalam Mewujudkan Demokrasi dan Hak-Hak Perempuan Di Maroko", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2012), 33-40.

dan pemuda lainnya, mereka turun ke jalan-jalan kota untuk menyuarakan semangat perjuangan dengan melantunkan “*Al-Hurriyat Jihaduna Hatta Narha*” (Kemerdekaan adalah jihad kami, kami akan terus berjuang sampai mencapainya).

Sebagai seorang perempuan Arab Muslim yang memperjuangkan kesetaraan gender, Fatima Mernissi memiliki dampak yang luas di kalangan intelektual di komunitasnya dan dikenal di dalam dan luar negeri terutama di Perancis. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang.

Mernissi selalu melakukan kunjungan ke negara-negara Islam untuk memberikan ceramah, termasuk Turki, Kuwait, dan Mesir. Dari pengalamannya, dia memberi kesimpulan bahwa banyak negara menggunakan Islam untuk justifikasi sensor dan ini berdampak besar pada kebebasan berpikir di setiap tempat. Meskipun di Maroko atau Turki ada kebebasan berbicara yang relatif aman, hal ini tidak berlaku di tempat lain yang lebih ketat dalam menyensor ekspresi.⁹

Fatima Mernissi adalah salah satu pemikir feminis terkemuka dari dunia Islam yang dikenal karena kontribusinya dalam memandang hubungan antara gender dan agama dalam konteks sosial-politik.¹⁰ Pemikiran Mernissi banyak dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya tumbuh di bawah sistem patriarkal yang membatasi kebebasan perempuan. Dalam karyanya yang terkenal *Beyond the Veil*, Mernissi mengkritik secara tajam interpretasi agama yang konservatif terhadap peran perempuan dalam masyarakat Muslim. Ia menilai bahwa tafsir-tafsir tradisional cenderung mendistorsi pesan-pesan egaliter yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang semestinya mendukung kesetaraan gender. Dalam kajian intelektualnya, Mernissi mendekonstruksi mitos-mitos yang melibatkan perempuan dan menggambarkan mereka sebagai entitas yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, terutama dalam hal kepemimpinan dan politik. Perspektif feminis yang dibawanya bertujuan untuk membuka wawasan baru tentang potensi perempuan dalam kehidupan sosial-politik, dan bukan sekadar mempertanyakan peran mereka, tetapi juga memberikan solusi terhadap ketidakadilan yang ada dalam interpretasi agama.¹¹

Dalam karyanya yang berjudul *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Mernissi berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana posisi perempuan dalam Islam dibentuk oleh sejarah dan tafsir agama. Buku ini menggali lebih dalam tentang bagaimana pemikiran-pemikiran teologis dan historis mengatur kehidupan perempuan dalam masyarakat Muslim. Mernissi menunjukkan bahwa banyak hukum Islam yang memposisikan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki, namun di sisi lain, ia juga menyoroti bagaimana interpretasi terhadap hukum-hukum ini dapat berbeda-beda dan bahwa dalam banyak hal, pemahaman terhadap Al-Qur'an seharusnya lebih progresif dan egaliter.¹² Mernissi mengusulkan agar perempuan

⁹ Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*, (Medan: Widya Puspita, 2018), 19-21.

¹⁰ Leon Rohendi dan Lilly Suzana, “Gender dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3, No. 2, (2023): 275.

¹¹ Andri Sutrisno dan Dini Salsabela, “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi”, *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2 (2022): 225-241.

¹² Fatima Mernissi, *Beyond the Veil Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. (India: Indiana University Press, 1987).

diberikan lebih banyak hak, terutama dalam hal pendidikan dan partisipasi politik. Menurutnya, perempuan dalam Islam seharusnya tidak dilihat sebagai entitas yang inferior, melainkan sebagai individu yang memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam politik.¹³

Mernissi berpendapat bahwa tafsir dan interpretasi yang selama ini diterima dalam dunia Islam cenderung merugikan perempuan, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan dan partisipasi dalam politik. Dalam bukunya *The Forgotten Queens of Islam*, Mernissi menyoroti sejumlah tokoh perempuan dalam sejarah Islam yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan dan politik, namun kontribusi mereka seringkali terlupakan dalam narasi sejarah *mainstream*. Menurutnya, penghapusan tokoh-tokoh perempuan ini dari catatan sejarah adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan struktur patriarkal dalam masyarakat Muslim. Mernissi mengusulkan bahwa kita perlu menggali kembali sejarah ini untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam memahami peran mereka dalam kehidupan sosial-politik.¹⁴

Dalam pandangan Mernissi, perjuangan perempuan dalam dunia Islam tidak hanya berkaitan dengan perlawanan terhadap patriarki, tetapi juga dengan upaya untuk menghadirkan kembali ajaran-ajaran Islam yang egaliter dan mendukung hak-hak perempuan. Pemikirannya menunjukkan adanya ruang untuk reinterpretasi ajaran Islam yang lebih inklusif terhadap perempuan, dengan memanfaatkan tafsir yang lebih progresif dan berfokus pada kesetaraan gender. Mernissi tidak hanya menawarkan kritik terhadap tafsir yang ada, tetapi juga berupaya untuk memberikan jalan keluar bagi perempuan untuk memperoleh posisi yang lebih setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan politik.

Pemikiran Mernissi sangat relevan dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi tantangan terhadap kesetaraan gender dalam politik dan masyarakat Islam. Dengan karya-karyanya, Mernissi membuka diskursus baru mengenai peran perempuan dalam Islam dan politik. Ia mengajukan pertanyaan mendalam mengenai peran perempuan sebagai pemimpin, mengkritik tafsir-tafsir patriarkal yang mendominasi, dan mendorong sebuah pembacaan ulang terhadap teks-teks suci untuk memastikan bahwa perempuan dapat memiliki peran yang lebih aktif dan setara dalam kehidupan publik. Perspektif feminis yang ia tawarkan dalam konteks Islam ini telah memberikan banyak kontribusi bagi pengembangan pemikiran gender dalam studi-studi Islam kontemporer.

B. Pendekatan Feminisme Menurut Mernissi

Feminisme dalam Islam hadir sebagai respons atas ketimpangan gender yang terjadi dalam praktik sosial maupun dalam interpretasi teks-teks keagamaan. Gerakan ini berupaya merekonstruksi pemahaman Islam yang lebih inklusif terhadap perempuan, sekaligus melawan pandangan patriarkal yang telah terinternalisasi dalam budaya masyarakat Muslim. Pandangan ini tidak hanya mengevaluasi praktik sosial,

¹³ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. (India: Indiana University Press, 1987).

¹⁴ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. (India: Indiana University Press, 1987).

tetapi juga mengkritisi dominasi laki-laki yang sering tercermin dalam tafsir-tafsir agama yang dianggap tidak memadai dalam merepresentasikan keadilan gender.¹⁵

Pendekatan feminisme Islam menempatkan tafsir agama sebagai objek kajian utama dengan kerangka berpikir kritis. Fatima Mernissi, salah satu tokoh feminisme Islam, menyoroti bahwa ketimpangan gender tidak hanya disebabkan oleh budaya patriarkal, tetapi juga dipengaruhi oleh bias tafsir teks-teks keagamaan yang mengabaikan konteks historisnya. Mernissi menegaskan bahwa pemahaman tradisional terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadits sering kali melanggengkan ketidaksetaraan gender karena tidak mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya pada masa turunnya wahyu.¹⁶

Melalui analisis kontekstual, feminisme Islam berusaha mengangkat posisi perempuan dalam Islam sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran agama. Pendekatan ini berakar pada metode hermeneutik feminis, yang menekankan pentingnya pembacaan ulang teks agama dengan mempertimbangkan konteks sosial-historisnya. Dengan demikian, feminisme Islam bukan hanya menentang diskriminasi, tetapi juga menawarkan alternatif pemahaman yang mendorong transformasi sosial menuju kesetaraan gender yang sejati dalam kerangka Islam.¹⁷

Mernissi, melalui karyanya seperti *Beyond the Veil* dan *The Veil and the Male Elite*, mengajukan kritik terhadap narasi-narasi historis yang menempatkan perempuan sebagai subordinat. Ia mengidentifikasi adanya pengaruh patriarki dalam proses kodifikasi hukum Islam dan penyusunan hadis, yang sering digunakan untuk membatasi hak perempuan. Misalnya, dalam pembahasan kepemimpinan politik perempuan, Mernissi menunjukkan bahwa penafsiran yang menghambat partisipasi perempuan lebih didasarkan pada kepentingan politik dan budaya daripada pada prinsip-prinsip teologis Islam. Dengan demikian, feminisme Islam tidak hanya berusaha untuk membongkar bias gender dalam teks, tetapi juga menantang struktur sosial yang menguatkan bias tersebut.¹⁸

Salah satu feminisme Islam adalah pengakuan terhadap keragaman pengalaman perempuan di berbagai konteks sosial dan geografis. Pendekatan ini menekankan bahwa Islam tidak monolitik; praktik dan interpretasinya beragam sesuai dengan budaya dan sejarah masyarakat Muslim. Dalam hal ini, feminisme Islam juga menolak klaim universalitas feminisme Barat, dengan menawarkan alternatif yang lebih relevan untuk masyarakat Muslim. Dengan demikian, feminisme Islam berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dengan keimanan, sambil tetap mempertahankan identitas keagamaan. Konsep ini menjadi relevan dalam perdebatan

¹⁵ Munawwarah, Sabri Samin, dan Tenri Padang, "Kepimimpinan Politik Perempuan Menurut Fatima Mernissi", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, Vol. 5, No. 1, (2024): 37-47.

¹⁶ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Bandung: Pustaka Belajar, 1991).

¹⁷ Nila Sastrawaty, "Pro-Kontra Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Feminisme Muslim", *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 7, No. 1 (2023): 59-70.

¹⁸ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997).

global mengenai hak-hak perempuan, karena ia menjembatani antara tradisi keagamaan dan tuntutan modernitas.¹⁹

Feminisme Islam juga menjadi wadah solidaritas bagi perempuan Muslim dalam memperjuangkan keadilan gender di berbagai aspek kehidupan. Pendekatan ini tidak terbatas pada isu-isu domestik, tetapi juga mencakup bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Tokoh seperti Fatima Mernissi menekankan pentingnya peran perempuan dalam politik sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil. Mernissi berargumen bahwa pengabaian peran perempuan dalam ruang publik bertentangan dengan sejarah Islam yang mencatat kontribusi signifikan perempuan pada masa awal perkembangan agama.²⁰

Melalui narasi-narasi progresif dalam al-Qur'an dan sejarah Islam, feminisme Islam membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam semua dimensi kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan revisi tafsir agama, tetapi juga menyadarkan perempuan Muslim akan potensi mereka dalam membangun masyarakat yang inklusif. Feminisme Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam Islam bersifat universal dan dapat diterapkan secara setara untuk laki-laki maupun perempuan.

Dengan fokus pada pemberdayaan perempuan, feminisme Islam juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan gender sebagai bagian dari praktik keimanan. Ini menjadi dasar bagi upaya transformasi sosial yang tidak hanya mengadvokasi hak-hak perempuan, tetapi juga menegaskan bahwa Islam memiliki kerangka nilai yang mendukung kesetaraan dan partisipasi aktif perempuan dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadaban.

C. Kritik Fatima Mernissi terhadap Penafsiran Klasik tentang Peran Politik Perempuan

1. Analisis Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Dianggap Membatasi Peran Politik Perempuan.

Terkait konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam memang masih menjadi tema yang diperdebatkan di kalangan mufassir antara kebolehan dan pelarangannya²¹. Meskipun secara tersirat di beberapa penafsiran lebih banyak pelarangannya. Surat dalam al-Qur'an yang selalu dikaji dalam pembahasan ini ialah QS. An-Nisa [4]: 34. Dan ayat tersebut memang sering dipandang membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan, berikut adalah bunyi ayatnya

a. QS. An-Nisa [4]: 34:

¹⁹ Yusawinur Barella, Muhammad Sadik Sabry dan Mardan, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an: Studi Analisis terhadap Peran dan Hak-Hak Perempuan", *Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 5, No. 3 (2023): 224-234.

²⁰ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil* (India: Indiana University Press, 1987).

²¹ Wawan Iwandri, "Rasionalitas Penafsiran Gender Dalam Tafsir al-Manar (Kajian Tafsir Tematik)", *Tesis PTIQ Jakarta* (2023): 130.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَذَلِكُمْ قَوْلُ اللَّهِ عَنِ الْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّ تَخَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأُخْزَوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh karena itu, perempuan yang saleh adalah perempuan yang taat kepada Allah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada, serta menerima arahan dengan baik. Dan perempuan yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, pisahkan tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka."

Ayat ini sering dijadikan dasar untuk menafsirkan bahwa perempuan tidak cocok memegang posisi kepemimpinan publik. Tetapi memang larangan kepemimpinan perempuan atas laki-laki secara tegas di temukan dalam ayat ini yakni dalam penggalan "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" yang berarti laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Penggalan ayat tersebut bisa dipahami jika perempuan menjadi pemimpin itu haram, namun itu ketika memahami ayat secara literal atau parsial, ketika membaca ayat tersebut secara komprehensif maka akan melihat dan menemukan makna yang berbeda. Ada penggalan ayat selanjutnya yakni "بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" yang berarti kepemimpinan laki-laki dapat berlaku saat laki-laki memiliki kelebihan dan kelebihan tersebut ialah mampu berbuat baik, mengayomi dan melindungi perempuan. Kemudian penggalan ayat selanjutnya ialah "وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" yang berarti bahwa kepemimoinan laki-laki juga berlaku ketika laki-laki mampu memberikan nafkah bagi perempuan dan keluarganya. Oleh karenanya, jika melihat ayat tersebut secara utuh tentunya memberikan pemahaman yang berbeda dan komprehensif.

Namun, para mufassir kontemporer berpendapat bahwa ayat ini lebih berkaitan dengan pembagian peran dalam rumah tangga dan tidak mengesampingkan kemampuan perempuan untuk memimpin di luar ranah domestik. Salah satunya dalam pemaknaan kata *qawwam* dalam ayat tersebut menjadi sangat penting bagi setiap mufassir, bahwa kata *qawwam* itu memiliki makna yang beragam, tetapi yang dipahami secara umum ialah pemimpin. Memaknai *qawwam* dengan pemimpin itu pada dasarnya tidaklah salah, akan tetapi menurut M. Quraish Shihab²², selain bermakna pemimpin, terdapat berbagai macam makna lain dari *qawwam* diantaranya pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, perlindungan dan pembinaan. Maka itulah yang harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan bahwa anugrah kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki tidak boleh melahirkan sikap kesewenang-wenangan dan segala situasi dan kondisi.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishabab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 407.

Berbeda halnya dengan mufassir klasik, salah satunya Tafsir Ibnu Katsir²³ yang memaknai lafadz *qawwam* sebagai pemimpin, kepala, hakim dan pendidik yang hanya diemban oleh laki-laki. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Salam penafsiran kalimat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* secara sekilas akan terlihat bias bahwa perempuan tidak memiliki kesempatan menjadi pemimpin dalam ruang publik bahkan domestik. Hal tersebut diperkuat dengan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa perempuan dalam ranah domestik memiliki kewajiban untuk taat kepada pemimpin yang mana suaminya sendiri. Pembatasan ruang gerak yang terjadi terhadap perempuan itulah sebagai salah satu bentuk budaya patriarki yang ada pada saat itu.

Hal ini menunjukkan bahwa tafsir klasik sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal yang berlaku pada masa tersebut, khususnya yang terjadi pada masa Ibnu Katsir yang dipengaruhi oleh kepentingan politik yang mempertahankan dominasi laki-laki dalam sistem pemerintahan. Oleh karenanya perlu ditafsirkan kembali dengan pendekatan yang lebih kontekstual untuk mengakomodasi perubahan zaman dan kebutuhan keadilan gender.

Jika melihat kondisi sekarang, terkait kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki tersebut telah terbantahkan oleh fakta-fakta yang terjadi. Realitas sosial dan sejarah modern sudah membuktikan bahwa banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya kaum laki-laki yang bisa melakukannya, meskipun budaya patriarkal itu masih membelenggu dan laki-laki masih berusaha untuk tetap mempertahankan superioritas dirinya. Kehebatan intelektual, pendidikan dan profesi merupakan syarat untuk sebuah kepemimpinan saat ini, dalam berbagai wilayah. Dengan demikian, hal tersebut menjadi peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk bisa aktif dan menduduki posisi-posisi kepemimpinan dalam ranah publik dan politik.

b. QS. At-Taubah [9]: 71

Selanjutnya dalam kajian al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat yang memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan. Salah satu ayat yang sering dikutip dalam perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan adalah QS. At-Taubah [9]: 71, berikut bunyi ayatnya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) munkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi Rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

²³ Abu Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* Juz 2, (Riyadh: Dar Thaibah, 1999), 292.

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang setara dalam masyarakat, terutama dalam konteks kepemimpinan dan tugas sosial. Pemahaman ini menegaskan bahwa tidak ada pembatasan dalam Islam mengenai partisipasi perempuan dalam ranah kepemimpinan, baik dalam skala domestik maupun publik. Sebaliknya, ayat ini mendukung perspektif inklusif dalam peran perempuan di ruang publik, termasuk dalam kepemimpinan politik atau sosial. Bahkan masing-masing dari keduanya boleh ikut berpartisipasi dalam politik, mengatur dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum²⁴. Hak-hak politik itu mencakup:

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat dan keyakinan
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul
3. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara
4. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara
5. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua atau anggota Dewan
6. Hak untuk memberikan suara dalam pemilu

Islam mengakui pentingnya peran perempuan dalam ranah politik untuk berdampak di masyarakat. Oleh karenanya kaum perempuan diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status yang bermartabat, terhormat dan mulia.

c. QS. An-Naml [27]: 23-24

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۚ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۚ

Artinya: “Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugrahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar, Aku (burung Hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat petunjuk.”

Selanjutnya cerita dalam al-Qur'an tentang kepemimpinan perempuan itu terdapat dalam QS. An-Naml [27]: 23-24. Bahwa ayat tersebut menggambarkan bahwa pernah terjadi dalam sejarah, bahwa seorang perempuan memimpin sebuah negara, yaitu Ratu Bilqis dan kaumnya Bernama kaum Saba'. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Ratu Bilqis memiliki kekuasaan yang tinggi akan tetapi kaumnya tidak beriman kepada Allah melainkan menjadi penyembah matahari.²⁵ Beberapa mufassir bahkan menyebutkan dan mengakui kepemimpinannya Ratu Bilqis itu sangat cakap dan hebat. Ratu Balqis membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin. Dengan menggali kembali sejarah ini, feminisme Islam tidak hanya

²⁴ Liky Faizal, “Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)", *Jurnal TAPIS*, Vol. 12, No. 1 (2016): 99.

²⁵ Fathurrahman, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan”, *Jurnal Online Kopertais Wliayah IV*, Vol. IX, No. 1 (2016): 167.

mendekonstruksi narasi patriarkal tetapi juga membangun fondasi yang lebih inklusif bagi perempuan di dunia Islam kontemporer.²⁶

Selain itu, dalam kajian kontemporer, banyak peneliti berargumen bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan dan kepemimpinan perlu dipahami dalam konteks sosial dan historis yang lebih luas. Surat Al-Ahzab [33]: 35 yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang setara dengan laki-laki dalam berbagai amal ibadah dan kebaikan, mendukung pemahaman bahwa dalam hal kepemimpinan, keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan di mata Allah. Ayat ini berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya laki-laki Muslim dan perempuan Muslim, laki-laki beriman dan perempuan beriman, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, laki-laki yang menjaga kehormatan dan perempuan yang menjaga kehormatan, laki-laki yang banyak berdzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah, bagi mereka Allah menyediakan ampunan, rahmat, dan pahala yang besar.*”

Dalam tafsir feminis, ayat ini dipahami sebagai penegasan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk berperan aktif dalam masyarakat, termasuk dalam posisi kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam, dalam pemahaman yang lebih progresif, tidak membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, tetapi justru mendorong kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada intinya bahwa terkait kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an menunjukkan tidak ada alasan teologis yang secara eksplisit melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan publik. Akan tetapi, memilih seseorang yang paling cocok untuk dijadikan pemimpin dan mengemban tanggungjawab tentunya merupakan suatu proses yang dinamis. Jika ada seorang perempuan yang lebih kompeten, berwawasan luas dan baik dalam segala sesuatu tentu mungkin akan lebih baik untuk dijadikan pemimpin suatu negara. Begitupun dalam sebuah keluarga, bisa saja seorang suami itu lebih banyak memiliki sifat sabar dalam merawat anak-anak. Dalam artian, kepemimpinan itu bukanlah karakteristik abadi dari semua laki-laki, begitupun dalam perawatan anak bukan karakteristik abadi dari semua perempuan.²⁷ Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut lebih banyak berfokus pada keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan.

²⁶ <https://infid.org/pandangan-fatima-mernissi-terhadap-peran-politik-khadijah-dan-aisyah-di-masa-awal-islam/> diakses pada 17 November 2024

²⁷ Waesul Kurni, “Relasi Gender Dalam Transformasi Sosial Perspektif al-Qur'an”, *Disertasi Program Studi Doktor Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, (2023): 195.

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, banyak intelektual Muslim yang menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut perlu dilihat dalam kerangka pemberdayaan perempuan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka. Dalam konteks ini, Fatima Mernissi dalam karya-karyanya, seperti *Women and Islam* dan *Can We Women Head a Muslim State* mendorong pembacaan ulang terhadap teks-teks agama untuk menghilangkan bias gender yang telah mengakar dalam tafsir klasik. Mernissi menekankan bahwa Islam memberikan hak yang setara kepada perempuan dalam hal kepemimpinan, dan interpretasi terhadap ayat-ayat ini harus lebih menekankan pada konteks sosial dan politik modern, di mana perempuan memiliki potensi dan kemampuan untuk memimpin dalam berbagai sektor kehidupan.

2. Reinterpretasi Ayat-Ayat Politik dalam Tafsir Feminis

Reinterpretasi ayat-ayat politik dalam Al-Qur'an melalui perspektif tafsir feminis menawarkan pembacaan baru terhadap peran dan posisi perempuan dalam kehidupan publik, termasuk dalam hal kepemimpinan. Seiring dengan perkembangan pemikiran sosial dan politik, tafsir feminis berupaya untuk menggali makna teks-teks klasik yang sering dipahami dengan pendekatan patriarkal. Sebagai contoh, tafsir terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang kepemimpinan, seperti Surah An-Nisa (4:34) yang sering digunakan untuk membatasi peran perempuan dalam rumah tangga, kini ditafsirkan ulang untuk melihatnya sebagai konteks peran perempuan yang lebih luas dan inklusif. Dalam hal ini, tafsir feminis menekankan bahwa ayat-ayat ini tidak boleh dipahami secara literal, tetapi harus dipandang sebagai refleksi dari dinamika sosial dan budaya pada masa penurunan wahyu. Oleh karena itu, tafsir feminis menawarkan wawasan baru dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan mendekonstruksi struktur patriarkal yang dominan dalam tafsir konvensional.

Salah satu tokoh utama dalam tafsir feminis adalah Fatima Mernissi, yang mengkritik tafsir tradisional yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Dalam karyanya *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Mernissi menjelaskan bahwa tafsir yang terbentuk pada masa-masa awal Islam sering kali didominasi oleh pemikiran laki-laki, yang menyebabkan interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an menjadi terdistorsi dalam hal peran perempuan. Mernissi berargumen bahwa pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat perlu ditinjau ulang dengan melihat konteks sosial yang lebih luas, termasuk bagaimana kondisi perempuan pada masa tersebut dibandingkan dengan kondisi perempuan pada masa kini. Pemikiran ini membuka ruang bagi tafsir yang lebih progresif yang memungkinkan perempuan untuk memegang peran sentral dalam kehidupan politik, sosial, dan keagamaan.

Menurut analisis yang dilakukan oleh para ahli tafsir feminis dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan tafsir feminis tidak hanya berfokus pada perubahan struktur politik yang memperbolehkan perempuan terlibat dalam kepemimpinan, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Al-Qur'an bisa diterjemahkan dalam konteks sosial dan politik modern. Salah satu contoh penting adalah tafsir terhadap Surah Al-Ahzab (33:35), yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek ibadah dan kebaikan. Dalam tafsir feminis, ayat ini dipahami sebagai penegasan bahwa perempuan memiliki hak yang

setara dengan laki-laki untuk berperan aktif dalam masyarakat, termasuk dalam posisi kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam, dalam pemahaman yang lebih progresif, tidak membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, tetapi justru mendorong kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan.

Tafsir feminis juga mengajak para intelektual Muslim untuk merujuk kembali kepada sumber-sumber utama Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, dengan pendekatan yang lebih kritis terhadap struktur sosial yang menindas perempuan. Konsep-konsep seperti keadilan sosial dan kesetaraan gender yang terkandung dalam ajaran Islam harus menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, tafsir feminis bukan hanya merupakan respons terhadap dominasi patriarkal dalam tafsir tradisional, tetapi juga sebagai usaha untuk menghidupkan nilai-nilai Islam yang sejati yang mendorong pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik dan kepemimpinan.

3. Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Peran Politik Perempuan

Pemikiran Fatima Mernissi tentang peran perempuan dalam politik sangat penting untuk dikaji dan digaungkan. Sebagai seorang intelektual Maroko yang dikenal karena kajian feminisme dan Islamnya, Mernissi memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam konteks partisipasi perempuan dalam politik. Pemikirannya mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar agama Islam serta tradisinya yang lebih progresif mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan, menghasilkan gagasan-gagasan yang mengkritik norma patriarki yang telah lama mengakar dalam masyarakat Muslim.²⁸

Fatima Mernissi memulai pemikirannya dengan menganalisis dasar ajaran Islam yang berkaitan dengan perempuan. Ia menyoroti bahwa dalam al-Qur'an, yang merupakan sumber utama hukum Islam, tidak ada larangan langsung mengenai perempuan yang menjadi pemimpin negara. Mernissi juga menekankan bahwa al-Qur'an memberikan contoh perempuan yang berperan besar dalam sejarah Islam, seperti Khadijah, istri Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan penasihat politik.²⁹ Dalam bukunya yang terkenal, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Mernissi menggali teks-teks klasik Islam dan hadis-hadis untuk menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad, perempuan terlibat dalam masjid, menghadiri pertemuan politik, dan memberikan nasihat politik. Ia menafsirkan sejarah Islam awal sebagai periode di mana perempuan memiliki kebebasan dan keterlibatan politik yang lebih besar daripada yang dipahami dalam budaya Muslim saat ini.³⁰

Namun, Mernissi juga mengamati bahwa seiring berjalannya waktu, pandangan dan interpretasi agama Islam berubah, yang akhirnya membatasi peran perempuan

²⁸ Askana Fikriana dan Sri Mulyani, "Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara Menurut Pandangan Islam: Studi Pemikiran Fatima Mernissi", *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (2023): 24-31.

²⁹ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (London: Basil Blackwell, 1991), 5-7.

³⁰ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1991), 12-18.

dalam kepemimpinan politik. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, tradisi konservatif, dan penafsiran selektif terhadap teks-teks agama menyebabkan terbatasnya partisipasi perempuan dalam politik. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik Islam dalam ranah politik tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip asli yang terdapat dalam agama. Mernissi juga mengamati perbedaan pandangan tentang peran perempuan dalam kepemimpinan antara berbagai mazhab Islam. Beberapa mazhab mungkin lebih menerima peran perempuan dalam politik, sementara lainnya lebih konservatif. Ini menggambarkan adanya beragam pendekatan di kalangan masyarakat Muslim mengenai isu ini, dan pandangan Mernissi berusaha memperjuangkan peran perempuan yang lebih besar dalam kepemimpinan politik.

Dalam pemikirannya, Mernissi mengajak kita untuk memikirkan kembali ajaran Islam dan membedakan antara prinsip-prinsip dasar agama dengan interpretasi yang telah terdistorsi oleh faktor budaya dan sejarah. Ia menekankan pentingnya memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam dan mengubah pandangan yang keliru tentang agama, yang sering digunakan untuk membenarkan pembatasan terhadap perempuan. Selain itu, Mernissi menyoroti pentingnya masyarakat Muslim untuk kembali pada akar-akar pemikiran Islam yang inklusif dan progresif. Ia menegaskan bahwa Islam, dalam esensinya, adalah agama yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama harus menciptakan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kepemimpinan politik.³¹

Pemikiran Mernissi juga sangat relevan dalam konteks perkembangan politik dan sosial dunia Arab dan Muslim. Dengan munculnya berbagai gerakan sosial dan politik yang menuntut perubahan, pertanyaan tentang peran perempuan dalam perubahan politik semakin mendesak. Pemikiran Mernissi mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan kembali peran perempuan dalam proses perubahan dan pembangunan politik. Dalam rangka mencapai kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik, Mernissi mendukung dialog terbuka dan konstruktif antara cendekiawan, pemimpin agama, dan masyarakat. Ia percaya bahwa dengan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam yang inklusif, masyarakat Muslim dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk partisipasi perempuan dalam politik. Pemikiran Fatima Mernissi yang mendalam, dengan analisis sejarah, teologi, dan sosial, terus mempengaruhi perdebatan mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan politik dalam Islam dan menginspirasi upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim.³²

Faktor-faktor budaya, sejarah, dan sosial dalam masyarakat Muslim telah memberikan dampak signifikan terhadap pandangan mengenai kepemimpinan perempuan, dan sejauh mana pandangan-pandangan ini sejalan atau bertentangan

³¹ Askana Fikriana dan Sri Mulyani, "Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara Menurut Pandangan Islam: Studi Pemikiran Fatima Mernissi", 24-31.

³² Fatima Mernissi, *Islam and Democracy: Fear of the Modern World* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1992), 34-36.

dengan pemikiran Fatima Mernissi adalah topik yang kompleks dan beragam. Untuk memahami dampak faktor-faktor ini, perlu dilakukan analisis mendalam.³³

Pertama, dalam konteks budaya, masyarakat Muslim telah lama didominasi oleh budaya patriarki yang kuat. Norma-norma dan nilai-nilai tradisional yang memandang perempuan sebagai sosok yang seharusnya berada di balik layar dan mengurus urusan domestik telah mengakar dalam masyarakat. Budaya ini menciptakan hambatan besar bagi partisipasi perempuan dalam politik, karena pandangan tradisional sering kali menyatakan bahwa perempuan tidak seharusnya terlibat dalam ranah publik atau memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Pandangan ini bertentangan dengan pemikiran Mernissi yang menegaskan bahwa ajaran asli Islam, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an, tidak melarang partisipasi perempuan dalam pemerintahan.

Kedua, faktor sejarah juga berperan penting dalam membentuk pandangan terhadap kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Muslim. Sejarah umat Islam melalui berbagai periode, dari kejayaan hingga kemunduran, telah mempengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang. Sebagai contoh, pada masa awal Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Mernissi, perempuan memiliki peran aktif dalam banyak aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan adanya pergolakan sejarah, modernisasi, dan pengaruh kolonialisasi, pandangan terhadap perempuan mulai berubah, dan di beberapa negara pandangan yang lebih konservatif terhadap perempuan mulai diadopsi, yang mengurangi keterlibatan perempuan dalam politik.

Faktor sosial juga memainkan peran penting dalam pandangan terhadap kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Muslim. Tingkat pendidikan, akses perempuan ke pekerjaan, dan perubahan sosial lainnya dapat memengaruhi apakah perempuan memiliki peluang dan dorongan untuk terlibat dalam politik. Di negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan akses lebih besar ke pekerjaan, perempuan mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam politik, meskipun tantangan sosial masih ada. Sementara itu, di negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dan ketidaksetaraan gender yang lebih besar, perempuan sering kali menghadapi hambatan besar untuk terlibat dalam kepemimpinan politik. Dalam hal ini, terdapat kesamaan antara faktor-faktor budaya, sejarah, dan sosial dengan pemikiran Fatima Mernissi. Mernissi juga mengakui bahwa faktor-faktor ini telah memengaruhi pandangan terhadap perempuan dalam masyarakat Muslim. Namun, ia menekankan bahwa kembali pada ajaran asli Islam yang inklusif dan progresif sangat penting, karena ajaran tersebut tidak membatasi partisipasi perempuan dalam politik.

Pandangan terhadap kepemimpinan perempuan dalam Islam juga dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi agama antara berbagai mazhab dalam Islam. Beberapa mazhab mungkin lebih liberal dalam menerima peran perempuan dalam politik, sementara yang lain mungkin lebih konservatif. Perbedaan pandangan ini menciptakan keragaman pendekatan di kalangan masyarakat Muslim terkait isu ini. Pemikiran Mernissi menjadi salah satu suara yang mengadvokasi peran perempuan

³³ Fatima Mernissi, *Islam and Democracy: Fear of the Modern World* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1992), 12–14.

yang lebih besar dalam kepemimpinan politik, meskipun terdapat perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab yang ada. Kesimpulannya, faktor budaya, sejarah, dan sosial dalam masyarakat Muslim telah memengaruhi pandangan terhadap kepemimpinan perempuan dengan cara yang beragam. Pandangan-pandangan ini bisa saja sejalan atau bertentangan dengan pemikiran Fatima Mernissi yang menekankan pentingnya.³⁴

D. Implikasi Pemikiran Fatima Mernissi Terhadap Kesenjangan Gender dalam Islam Kontemporer

Pemikiran Fatima Mernissi dalam kajian gender dan Islam telah memberikan dampak signifikan terhadap pembahasan kesetaraan gender dalam Islam kontemporer. Mernissi mengkritik tafsir-tafsir klasik yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam kehidupan sosial, politik, dan agama.³⁵ Dalam bukunya *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Mernissi menunjukkan bagaimana tradisi tafsir yang dominan pada masa lalu didominasi oleh pandangan patriarkal, yang menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis untuk membatasi ruang gerak perempuan.³⁶

Pemikiran ini membuka ruang bagi reinterpretasi teks-teks tersebut, dengan tujuan untuk menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif ini, Islam dipandang sebagai agama yang pada dasarnya mendorong kesetaraan, tetapi sering disalahartikan oleh interpretasi yang patriarkal.³⁷

Mernissi menekankan bahwa tafsir feminis harus dilihat sebagai suatu metode pembacaan yang berupaya untuk melihat kesetaraan gender dalam ajaran Islam.³⁸ Dalam bukunya *The Veil and the Male Elite*, Mernissi berargumen bahwa posisi perempuan dalam sejarah Islam, yang seringkali diabaikan atau terpinggirkan, seharusnya tidak dibiarkan begitu saja.³⁹ Ia berusaha untuk menggali kembali kisah-kisah sejarah tentang perempuan-perempuan dalam Islam, seperti Khadijah dan Aisyah, yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam.⁴⁰ Pemikiran ini memberikan implikasi besar bagi pembaruan pemikiran tentang peran perempuan dalam Islam kontemporer.⁴¹ Mernissi mengajukan argumen bahwa perempuan

³⁴ Nawal El Saadawi, *The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World* (London: Zed Books, 1980), 89-91.

³⁵ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Oxford: Blackwell Publishers, 1991), 11-13.

³⁶ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Oxford: Blackwell Publishers, 1991), 15-17.

³⁷ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), 23-26.

³⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 32-34.

³⁹ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1991), 45-47.

⁴⁰ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1991), 49-51.

⁴¹ Valentine M. Moghadam, *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East* (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2003), 55-57.

bukanlah individu yang terlepas dari peran politik dan sosial, dan sebaliknya, mereka harus diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam masyarakat.⁴²

Implikasi lebih lanjut dari pemikiran Mernissi terlihat dalam pendekatannya terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan politik. Dalam buku *Can Women Head a Muslim State* Mernissi membahas isu perempuan yang memegang tampuk kepemimpinan dalam dunia Muslim. Ia mengkritik pandangan yang mengatakan bahwa perempuan tidak dapat memimpin negara Muslim, yang seringkali dihubungkan dengan tafsir terhadap ayat-ayat tertentu dalam al-Qur'an yang dianggap membatasi peran perempuan.⁴³ Mernissi menegaskan bahwa pembacaan terhadap ayat-ayat ini harus dikontekstualisasikan dalam perspektif zaman dan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer, yang menginginkan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara tanpa memandang gender.⁴⁴ Hal ini memberikan dasar bagi gerakan feminis dalam Islam untuk memperjuangkan hak perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan.

Kesetaraan gender dalam Islam kontemporer, menurut Mernissi, juga harus melibatkan pengakuan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi perempuan. Dalam bukunya *The Forgotten Queens of Islam*, Mernissi mengangkat kisah perempuan-perempuan yang pernah memerintah dalam sejarah Islam, yang diabaikan dalam tafsir-tefsir konvensional. Ia berpendapat bahwa sistem patriarkal dalam masyarakat Muslim sering kali menutupi kontribusi signifikan perempuan dalam membentuk peradaban Islam. Pemikiran ini memberi dampak pada pergerakan kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim, dengan menekankan pentingnya peran perempuan dalam politik, ekonomi, dan bidang sosial lainnya.⁴⁵

Melalui pemikirannya, Mernissi menginspirasi banyak intelektual dan aktivis perempuan Muslim untuk menantang tafsir patriarkal dan memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemikiran ini menciptakan dialog baru dalam Islam tentang bagaimana perempuan seharusnya diperlakukan secara setara dengan laki-laki, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun hak politik. Dalam Islam kontemporer, pemikiran Mernissi berperan penting dalam mendorong reformasi tafsir dan hukum Islam yang lebih adil, sehingga perempuan bisa memperoleh pengakuan dan kesempatan yang sama dalam berbagai sektor kehidupan.

E. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam dan Aspek Keindonesiaan

Ada beberapa perselisihan mengenai syarat untuk menjadi pemimpin. Salah satunya ialah terkait gender, beberapa berpendapat bahwa untuk menjadi pemimpin haruslah seorang laki-laki karena beban yang ditanggung berat dan perempuan tidak akan sanggup menanggungnya, namun ada juga yang berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan diperbolehkan, pernyataan tersebut selaras dengan

⁴² Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Bloomington: Indiana University Press, 1987), 70–73.

⁴³ Fatima Mernissi, *Can Women Head a Muslim State?* (London: Saqi Books, 2006), 1–3.

⁴⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 10–13.

⁴⁵ Fatima Mernissi, *The Forgotten Queens of Islam* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993), 9–12.

pemikiran Ibnu Jarir at-Thabari. Salah satu contohnya adalah terkait kekuasaan kehakiman yang mana itu merupakan kekuasaan tertinggi dan termasuk dalam kekuasaan publik. Ketika perempuan boleh menjadi hakim untuk menangani berbagai perkara, laki-laki tidak menjadi syarat dalam kekuasaan kehakiman. Bagi at-Thabari, jika perempuan bisa menjadi mufti, maka sangat logis jika ia bisa menjadi hakim juga. Tugas mufti adalah menjelaskan hukum-hukum agama melalui analisis ilmiah dengan tanggungjawab personal. Sementara, hakim juga memiliki tugas yang sama, tetapi dengan tanggungjawab negara atau atas dasar kekuasaan negara.⁴⁶

Jika dilihat dari kacamata fikih Islam, Al-Qardhawi dalam menyikapi kepemimpinan perempuan ini menganalisisnya menjadi 2 yakni teks agama mengenai kepemimpinan perempuan dan juga mengenai realitas keindonesiaan. Mengenai analisis teks hadits yang diriwayatkan oleh Abi Bakra yang dilegitimasi atas pelarangan perempuan menjadi seorang pemimpin. Bahwa hadits konteks hadits tersebut adalah untuk merespon kepemimpinan putri Kisra, sehingga demikian hadits tersebut tidak berlaku untuk umum, hal tersebut diperkuat dengan beberapa alasan. Pertama, hadits tersebut umumnya bertentangan dengan dzahir al-Qur'an, yang menceritakan kisah seorang perempuan yang memimpin kaumnya dengan adil dan bijaksana, salah satunya ialah Ratu Balqis. Selanjutnya, bahwa kenyataan sekarang memberikan banyak bukti bahwa perempuan tidak lemah, kuat, banyak berjasa terhadap negaranya melebihi laki-laki.⁴⁷

Adapun mengenai realitas sosial keindonesiaan, semua orang bahkan mengetahuinya bahwa sistem pemerintahan di Indonesia ialah demokrasi, yang segala sesuatunya dilakukan kemudian diputuskan secara musyawarah. Dalam artian, semua tanggungjawab atau tugas itu tidak dipikul secara individu melainkan diemban secara bersama atau kolektif dalam suatu lembaga/pemerintahan. Hal tersebut tentunya berlainan dengan realitas yang terjadi pada zaman dahulu, dimana suatu negara dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap rakyatnya, memiliki sikap otoriter dan segala kehendaknya harus dipatuhi dan rakyatnya hanya bisa tunduk patuh kepada raja.

Dengan kata lain Al-Qardhawi menyikapi terkait kepemimpinan perempuan itu sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk terlibat dalam suatu pemerintahan atau bahkan untuk menjadi seorang pemimpin sekaligus. Justru dalam kepentingan sosial itu perempuan mempunyai peranan penting dan keterlibatannya sangat dibutuhkan.

Perempuan sering dikategorikan memiliki karakter feminim yang negatif seperti mudah terpengaruh, mudah goyah, labil, kurang kompetitif, kurang logis, kurang bebas dalam berbicara dan lain sebagainya. Sehingga stereotype itulah yang mengakibatkan perempuan selalu dipandang lemah dan berada dibawah laki-laki hingga hanya layak untuk beraktivitas dalam ruang domestik saja. Padahal antara laki-laki dan perempuan itu memiliki peran dan fungsi masing-masing sesuai kapasitas dan kapabilitasnya dalam mengemban peran publik dan domestik.

⁴⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2021), 278.

⁴⁷ Moh. Nur Salim, *Fiqh Realistis Kajian Tentang Hubungan antara Fikih dengan Realitas Sosial pada Masa Lalu dan Masa Kini*, (t.t: hatiNURaniku Press, 2009), 111.

Sebenarnya partisipasi perempuan dalam ruang publik atau muncul sebagai tokoh penting itu sudah ada dan terjadi sejak masa awal Islam saat Nabi Muhammad masih hidup. Peristiwa tersebut diawali dari protes kaum perempuan yang merasakan ketidaknyamanan dengan konstruk sosial yang terjadi saat itu dimana aturan yang berlaku ialah peran perempuan selalu tidak dianggap dan terkesan mensubordinasi perempuan. Beberapa tokoh perempuan yang sangat berpengaruh serta berpartisipasi dalam ruang publik dengan mengambil peran penting dalam mengambil suatu keputusan ialah diantaranya Khodijah, Fatimah, Aisyah dan lain sebagainya. Mereka adalah perempuan-perempuan cerdas yang memiliki kemampuan ideal, sebanding dengan pemikiran laki-laki. Dan peran perempuan dalam sejarah Islam itu telah dicatat pada awal abad ke-7. Pada Intinya, sejak masa Nabi, perempuan memiliki peran penting dalam ruang publik. Nabi, bahkan sahabat-sahabat pun tidak pernah mencegah perempuan untuk melakukan segala aktivitas di ruang publik, tidaklah benar jika perempuan selalu tinggal di rumah sehingga adanya batasan-batasan kepada peran publik perempuan dalam islam⁴⁸.

Begitupun di Indonesia, para pejuang perempuan itu banyak telah membuktikan kontribusi, kualitas dan kiprahnya dalam tatanan sosial masyarakat. Mereka itu adalah Cut Nyak Dien, RA. Kartini, Dewi Sartika dan lain sebagainya. Perempuan-perempuan tersebutlah yang tampil dan mampu menjadi penentu sejarah di Indonesia. Fakta sejarah banyak membuktikan bahwa para perempuan berupaya bangkit dan menunjukkan eksistensi serta potensinya bahkan mesejajarkan dirinya dengan laki-laki.

Kesimpulan

Fatima Mernissi, seorang feminis Muslim, memberikan kritik mendalam terhadap penafsiran klasik ayat-ayat al-Qur'an yang ia pandang mereproduksi bias patriarkal. Dalam tafsir klasik, peran perempuan sering dibatasi hanya dalam lingkup domestik, sementara keterlibatan mereka dalam politik dan ranah publik dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Mernissi menilai bahwa pandangan ini lebih banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki daripada nilai-nilai egaliter yang sebenarnya terkandung dalam al-Qur'an.

Melalui pendekatan feminis, Mernissi menunjukkan bagaimana tafsir klasik cenderung memaknai teks agama secara literal, tanpa mempertimbangkan konteks sosial-historis turunnya wahyu. Sebagai contoh, QS. An-Nisa [4]: 34 yang sering dijadikan landasan dalam pelarangan kepemimpinan perempuan, menurutnya harus dibaca secara komprehensif. Ayat ini tidak menyatakan secara eksplisit larangan terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin, melainkan lebih menyoroti peran laki-laki sebagai penanggung jawab dalam kondisi tertentu. Tafsir kontekstual, seperti yang diajukan oleh mufassir kontemporer, justru menunjukkan fleksibilitas dalam peran gender sesuai situasi dan kebutuhan masyarakat.

Pemikiran Mernissi menekankan bahwa Islam, dalam esensinya, tidak membatasi peran perempuan dalam kehidupan publik, termasuk politik. Hambatan yang ada lebih banyak disebabkan oleh tafsir yang patriarkal dan kepentingan politik

⁴⁸ Ashgar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan dan Kebudayaan Kontemporer*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 316.

tertentu dalam sejarah Islam. Ia menyerukan reinterpretasi teks agama yang progresif, kontekstual, dan mendukung kesetaraan gender. Dalam pandangan Mernissi, nilai-nilai keadilan dan inklusivitas dalam Islam harus diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan modern, sehingga perempuan dapat berkontribusi setara dengan laki-laki dalam membangun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayaz, Hacer. "Methodological Approaches Used in the Works of Fatima Mernissi on Issues of Islam and Gender Equality", *Internasional Journal of Social Sciences*, Vol. 7, No. 28 (023).
- Barella, Yusawinur. Sabry, Muhammad Sadik dan Mardan. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an: Studi Analisis terhadap Peran dan Hak-Hak Perempuan", *Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 5, No. 3 (2023).
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.
- El Saadawi, Nawal. *The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World* (London: Zed Books, 1980).
- Engineer, Ashgar Ali. *Tafsir Perempuan Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Faizal, Liky. "Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)", *Jurnal TAPIS*, Vol. 12, No. 1 (2016).
- Fathurrahman. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan", *Jurnal Online Kopertais Wilayah IV*, Vol. IX, No. 1 (2016).
- Fikriana, Askana dan Mulyani, Sri. "Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara Menurut Pandangan Islam: Studi Pemikiran Fatima Mernissi", *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (2023).
- Handayani, Anita. "Fatima Mernissi: Riwayat Hidup dan Perjuangannya Dalam Mewujudkan Demokrasi dan Hak-Hak Perempuan Di Maroko", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2012).
- Iwandri, Wawan. "Rasionalitas Penafsiran Gender Dalam Tafsir al-Manar (Kajian Tafsir Tematik)", *Tesis PTIQ Jakarta* (2023).
- Karimullah, Suud Sarim dan Aliyah, Siti Rutbatul. "Feminist Criticism of Traditional Understanding of Women's Roles in Islam", *An-Nisa: Journal of Gender Studies*, Vol. 16, No. 2 (2023).
- Katsir, Abu Fida' Ismail bin Umar bin *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Juz 2*. Riyadh: Dar Thaibah, 1999.
- Kurni, Waesul. "Relasi Gender Dalam Transformasi Sosial Perspektif al-Qur'an", *Disertasi Program Studi Doktor Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, (2023).
- Mernissi, Fatima *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Bandung: Pustaka Belajar, 1991).
- _____, Fatima. *Beyond the Veil* (India: Indiana University Press, 1987).
- _____, Fatima. *Beyond the Veil Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. (India: Indiana University Press, 1987).
- _____, Fatima. *Can Women Head a Muslim State?*. London: Saqi Books, 2006.
- _____, Fatima. *Islam and Democracy: Fear of the Modern World* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1992).
- _____, Fatima. *The Forgotten Queens of Islam*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.

- _____, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1991)
- _____, Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (London: Basil Blackwell, 1991).
- Moghadam, Valentine M. *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2003.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCISoD, 2021.
- Munawwarah. Samin, Sabri dan Padang, Tenri. "Kepimimpinan Politik Perempuan Menurut Fatima Mernissi", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, Vol. 5, No. 1, (2024).
- N, Muarrah dan MB, Sunil. "Exploring Gender Equality: A Comparative Study of Contemporary Feminism, Islamic Perspectives, and Feminism in Sufism", *Philosophy International Journal*, Vol. 7, No. 2, (2024).
- Ramli, Mohd Anuar. Jaafar, Syed Mohd Jeffri Syed dkk. "Muslim-Malay Women in Political Leadership: Navigating Challenges and Shaping the Future", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1 (2024).
- Rohendi, Leon dan Suzana, Lilly. "Gender dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3, No. 2, (2023).
- Roibin. As-Suvi, Ahmad Qiram dkk. "The Domestication of Women's Roles as a Reflection of Ancient Patriarchal Traditions: A Reflection on The Thoughts of Friedrich Engels and Fatimah Mernissi", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 22, No. 1, (2023).
- Salim, Moh. Nur. *Fiqh Realistis Kajian Tentang Hubungan antara Fikih dengan Realitas Sosial pada Masa Lalu dan Masa Kini*. t.t: hatiNURaniku Press, 2009.
- Sastrawaty, Nila. "Pro-Kontra Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Feminisme Muslim", *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 7, No. 1 (2023).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishabab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sutrisno, Andri. dan Salsabela, Dini. "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi", *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2 (2022).
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*, (Medan: Widya Puspita, 2018).
- <https://infid.org/pandangan-fatima-mernissi-terhadap-peran-politik-khadijah-dan-aisyah-di-masa-awal-islam/> diakses pada 17 Maret 2025.